



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN BERUPA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA  
GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN OTA) Kabupaten Semarang dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas guna mendukung pengembangan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, maka perlu didukung dengan bantuan dana oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk mendukung peran Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada organisasi sosial kemasyarakatan berupa bantuan operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang ;
- c. bahwa agar pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816 );
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
  2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
  23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90);
  24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan pemberian Bantuan Hibah berupa Bantuan Operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 09-03-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 09-03-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN HIBAH BERUPA BANTUAN  
OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA  
GERAKAN NASIONAL ORANG TUA  
ASUH KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BANTUAN  
OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Prioritas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana manusia Indonesia sebagai titik pusat pembangunan, modal dasar yang menjadi faktor dominan dan sasaran utama pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia adalah peningkatan mutu kehidupan secara berkesinambungan dengan menciptakan individu manusia Indonesia seutuhnya yang dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Provinsi Jawa Tengah telah meletakkan landasan restrukturisasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tentang status Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) dari Cabang Yayasan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan peran Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan yang diperuntukkan kepada Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang sebagai organisasi sosial kemasyarakatan agar berupaya ikut berperan serta dalam mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan.

Agar pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yaitu Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang agar dapat berperan serta dalam peningkatan Sumber Daya Manusia ;

2. Mengembangkan dan meningkatkan potensi, sumber daya masyarakat untuk menunjang pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas anak bangsa.

## II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan hibah berupa bantuan operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk mendukung operasional Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan, mendukung dan memotivasi peran orang tua asuh dalam upaya memberikan kesempatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun kepada anak asuh.

### C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah berupa bantuan operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

### D. Penggunaan Bantuan

Bantuan sosial dipergunakan untuk biaya operasional Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang.

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Proposal diajukan dalam tahun bersangkutan ;
- B. Membuka rekening atas nama lembaga.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan:

1. Keputusan mengenai Kepengurusan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang ;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; dan

3. Laporan pelaksanaan kegiatan dari Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang.

#### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

1. Proses seleksi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud; dan
2. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

#### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan hasil penilaian terhadap proposal dimaksud selanjutnya oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dijadikan dasar untuk diusulkan kepada Bupati Semarang sebagai penerima bantuan;
2. Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran bantuan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

#### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama Ketua dan Bendahara Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang;
2. Penerima bantuan dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Ketua dan Bendahara Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang.

#### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemberian bantuan diberikan untuk Tahun Anggaran 2015 dan paling lama tanggal 31 Desember 2015, Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang selaku Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
  - c. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi dengan dibubuhi materai dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. rekapitulasi penggunaan bantuan ;
- e. dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan ;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Semarang
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi
  - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Kabupaten Semarang yang mencakup *out come* operasional lembaga berupa data orang tua asuh maupun anak asuh di Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
  - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan berupa Bantuan Operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN